

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Kabupaten Batang)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

DITA ARFIANTI

C2C607049

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dita Arfianti

Nomor Induk Mahasisws : C2C607049

Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (STUDI PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN
BATANG)**

Dosen Pembimbing : Warsito Kawedar, SE. M.Si, Akt.

Semarang, 18 Juli 2011

Dosen Pembimbing,

(Warsito Kawedar, SE. M.Si, Akt.)

NIP. 19740510 199802 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Dita Arfianti

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607049

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (STUDI PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN
BATANG)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 Agustus 2011

Tim Penguji :

1. Warsito Kawedar, SE, M.Si, Akt. (.....)
2. Dr. Endang Kiswara, M.Si, Akt. (.....)
3. Darsono, SE, MBA, Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dita Arfianti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 18 Juli 2011

Yang membuat pernyataan,

(Dita Arfianti)

NIM : C2C607049

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu diantaranya keandalan dan ketepatanwaktuan. Faktor-faktor yang diteliti antara lain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 110 eksemplar, yang dibagikan kepada responden yang merupakan kepala dan staf bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan PLS (*partial least square*).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

Kata Kunci : *pelaporan keuangan pemerintah daerah, nilai informasi, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah, dan PLS (partial least square).*

ABSTRACT

The objective of this research is to examine the factors that influence information value of local government financial reporting. Information value refers to reliability and timeliness. The factors that influence reliability and timeliness are human resource quality, information technology utilization, internal control system, and local financial monitoring.

Data collection was done by giving questionnaires to 110 heads and staffs of SKPD's accounting department in Batang District. The collected data then processed by using PLS (partial least square).

Hypotheses testing results are as follows. First, internal control system has a positive and significant influence on reliability of local government financial reporting while human resource quality, information technology utilization, and internal control system have no influence. Second, human resource quality and information technology utilization have a positive and significant influence on timeliness of local government financial reporting while internal control system has no influence.

Keywords : *local government financial reporting, information value, human resource quality, information technology utilization, internal control system, local financial monitoring, and PLS (partial least square).*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini memiliki keterbatasan. Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih, terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Warsito Kawedar, SE., M.Si, Akt selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs.Sudarno, M.Si, Akt, Ph.D selaku dosen wali.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Soerjanto dan Ibu Nining Hadiningsih, yang tidak henti-hentinya berdoa, memotivasi, dan memberi semangat untuk selalu bangkit serta mencurahkan segala perhatiannya bagi penulis.
8. Kakak tersayang, Mas Dimas Arifianto, yang selalu berdoa, memberikan semangat, motivasi, serta nasihat dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kekasih tersayang, Mas Ronny Cahyadi Utomo, yang selalu berdoa, memotivasi, dan menyemangati ketika menemui kesulitan.

10. Sahabat tercinta : Satiti, Ganesh, Alin, Lita, Ayu, Risa, Dyah Ayu, Kiki terima kasih untuk dukungan, kebersamaan dan persahabatannya.
11. Teman-teman seperjuangan akuntansi kelas A (Mira, Icha, Sari, Netty, Dewi, Tami, Desi) dan Akuntansi kelas B angkatan 2007.
12. Teman-teman kos : Juli, Nindy, Rina, Mba Septi, Nina, Ayumi, Eda, Atik, Sulis, terima kasih atas semangat dan dukungannya.
13. Mba Dewi, Bu Cicik, dan para staf di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang atas bantuannya dalam penyebaran kuesioner.
14. Teman-teman KKN Kaliwungu : Olin, Ariani, Destri, Siska, Nova, Bagus, Katon, Anggoro, Urfan, Antok, Lie, dan Pak Alif, terima kasih untuk semuanya yang telah berjuang bersama.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan tulisan ini ataupun bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 18 Juli 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1.3.1.Tujuan Penelitian	15
1.3.2.Kegunaan Penelitian	15
1.4. Sistematika Penulisan	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 18
2.1. Landasan Teori.....	18
2.1.1. <i>Agency Theory</i>	18
2.1.2. Aukuntabilitas.....	19
2.1.3. Transparansi.....	20
2.1.4. Pelaporan Keuangan Daerah.....	21
2.1.5. Nilai Informasi.....	23
2.1.6. Kualitas Sumber Daya Manusia.....	25
2.1.7. Teknologi Informasi.....	26
2.1.8. Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
2.1.9. Sistem Pengendalian Intern.....	27
2.1.10. Pengawasan Keuangan Daerah.....	29

2.2.	Penelitian Terdahulu.....	31
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	34
2.3.1.	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	34
2.3.2.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	36
2.3.3.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	37
2.3.4.	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	37
2.4	Hipotesis.....	39
BAB III	METODE PENELITIAN	41
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	
	Variabel.....	41
3.1.1.	Variabel Penelitian.....	41
3.1.2.	Definsi Operasional Variabel.....	41
	3.1.2.1.Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	41
	3.1.2.2.Kualitas Sumber Daya Manusia.....	42
	3.1.2.3.Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	42
	3.1.2.4.Sistem Pengendalian Intern.....	43
	3.1.2.5.Pengawasan Keuangan Daerah.....	43
3.2.	Populasi dan Sampel.....	48
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	48
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	49
3.5.	Metode Analisis.....	49
	3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas	49
	3.5.2. <i>Partial Least Square</i> (PLS).....	50
	3.5.2.1.Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i>	51
	3.5.2.2.Model Struktural atau <i>Inner Model</i>	52
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian.....	53
	4.1.1. Deskripsi Variabel.....	53
	4.1.2. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	53

4.1.3.	Deskripsi Responden Penelitian.....	53
4.2.	Analisis Data.....	55
4.2.1.	Pengujian <i>Outer Model</i>	56
4.2.1.1.	Nilai <i>Convergent Validity</i> Persamaan 1.....	56
4.2.1.2.	Nilai <i>Convergent Validity</i> Persamaan 1 (Setelah Re-estimasi).....	61
4.2.1.3.	Nilai <i>Convergent Validity</i> Persamaan 2.....	66
4.2.1.4.	<i>Discriminant Validity</i>	69
4.2.1.5.	Uji <i>Composite Reliability</i>	71
4.2.2.	Pengujian <i>Inner Model</i>	72
4.2.3.	Pengujian Hipotesis.....	74
4.3.	Interpretasi Hasil.....	78
4.3.1.	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	78
4.3.2.	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	79
4.3.3.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	80
4.3.4.	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	80
4.3.5.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	81
4.3.6.	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	82
4.3.7.	Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	82
BAB V	PENUTUP.....	84
5.1.	Simpulan.....	84
5.2.	Keterbatasan.....	85
5.3.	Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	87
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Kelompok Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2009.....	6
Tabel 1.2 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009	7
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	44
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	54
Tabel 4.2 Nilai <i>Outer Loading</i> Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia.....	56
Tabel 4.3 Nilai <i>Outer Loading</i> Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	57
Tabel 4.4 Nilai <i>Outer Loading</i> Variabel Sistem Pengendalian Intern.....	57
Tabel 4.5 Nilai <i>Outer Loading</i> Variabel Pengawasan Keuangan Daerah.....	58
Tabel 4.6 Nilai <i>Outer Loading</i> Variabel Keandalan.....	59
Tabel 4.15 Nilai <i>Outer Loading</i> Variabel Ketepatanwaktuan.....	67
Tabel 4.16 Nilai AVE Persamaan 1.....	71
Tabel 4.17 Nilai AVE Persamaan 2.....	71
Tabel 4.18 Nilai <i>Composite Reliability</i> Persamaan 1.....	71
Tabel 4.19 Nilai <i>Composite Reliability</i> Persamaan 2.....	72
Tabel 4.20 Nilai R-square Persamaan 1.....	70
Tabel 4.21 Nilai R-square Persamaan 2.....	70
Tabel 4.22 Hasil <i>Inner Weight</i>	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Hipotesis Persamaan 1.....	40
Gambar 2.2 Model Hipotesis Persamaan 2.....	40
Gambar 4.1 Hasil Pengujian PLS Persamaan 1.....	55
Gambar 4.2 Hasil Pengujian PLS Persamaan 1 (Setelah Re-estimasi).....	60
Gambar 4.3 Hasil Pengujian PLS Persamaan 2.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Kuesioner Penelitian.....	87
Lampiran B Hasil <i>Output</i> PLS.....	93
Lampiran C Daftar Distribusi Kuesioner.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Rasul, 2003).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
- 2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :
- a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat kerugian negara pada tahun 2009 sebesar Rp 3,55 triliun akibat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi atas 348 LKPD, terdapat 3.179 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan atas 348 LKPD tahun 2009 juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 4.708 kasus senilai Rp 3,55 triliun sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Kelompok Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2009

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
1.	Kerugian Daerah	1.246	306.637,34
2.	Potensi Kerugian Daerah	277	2.254.145,97
3.	Kekurangan Penerimaan	905	497.789,35
4.	Administrasi	1.785	-
5.	Ketidakhematan/Pemborosan	155	71.263,02
6.	Ketidakefisienan	1	9,82
7.	Ketidakefektifan	339	420.458,85
Jumlah		4.708	3.550.304,38

Sumber : BPK RI

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2009, dinyatakan bahwa terhadap 348 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 14 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 259 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 30 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 45 entitas. Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menunjukkan peningkatan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2007, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya kepada 4 entitas, tahun

2008 sebanyak 12 entitas, dan tahun 2009 sebanyak 14 entitas. Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diikuti penurunan proporsi opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. Perkembangan opini LKPD Tahun 2007, 2008, dan 2009 dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2007	4	1	283	60	59	13	123*	26	469
Tahun 2008	12	3	324	67	31	6	116*	24	483
Tahun 2009	14	4	259	74	30	9	45	13	348**

*) termasuk LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 dan 2008

***) jumlah opini yang diberikan sampai dengan semester I Tahun 2009

Selain kualitas LKPD yang belum maksimal, Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan adanya kasus dugaan korupsi. Pada pemeriksaan semester II tahun 2008, ada 11 dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK, 6 diantaranya terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Disamping itu, sekitar 683 objek pemeriksaan yang diperiksa oleh BPK, hampir separuhnya didominasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian LKPD dari waktu yang telah ditentukan. Terlambatnya LKPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah mengakibatkan BPK mengalami kesulitan dalam mengaudit pengelolaan keuangan daerah. Adapun LKPD yang terlambat

berjumlah 191 dari total 469 pemerintah daerah. Dengan demikian, hanya 275 pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD secara tepat waktu.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatanwaktuan. Mengingat bahwa keandalan dan ketepatanwaktuan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Zetra (2009) yang dilakukan di 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Penelitian lain dilakukan oleh BPK (Nazier, 2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh : 1) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; 2) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Warisno (2009), yang menemukan bukti bahwa tenaga keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tingkat SKPD di Provinsi Jambi masih kurang, sehingga belum dapat menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Disamping itu, ada indikasi rendahnya kinerja SKPD yang dikarenakan rendahnya kualitas SDM dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kualitas sumber daya manusia yang minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003). Namun, pengimplementasian teknologi informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, apabila teknologi informasi tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara optimal, maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Selain itu, terdapat kendala yang ditemui dalam penerapan

teknologi informasi, yaitu yang berkaitan dengan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Zetra (2009) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software*, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk dapat menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian

penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi (Wikipedia, 2010). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK, salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK menghimbau agar temuan tentang Sistem Pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Hal terakhir yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun

kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan jelas.

Perbedaan hasil kedua penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008), peneliti menambah satu faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu pengawasan keuangan daerah. Sehingga, penelitian ini diberi judul : “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini akan dilakukan pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang karena dianggap cukup mewakili kriteria yang dipilih. Hal ini terkait dengan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2010 dan merupakan kabupaten pertama se-Indonesia yang telah menyelesaikan laporan keuangan tahun 2010. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Batang dan pemerintah daerah pada umumnya dalam peningkatan kualitas nilai informasi pelaporan keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu keandalan dan ketepatanwaktuan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara terperinci dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Telaah Pustaka

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasannya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi

juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

2.1.2 Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adapun fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur, yaitu (1) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*, (2) *having the internal parties review the information*, and (3) *taking corrective actions where necessary*. Suatu entitas yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas) *me-review* informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif (Sugijanto, *et al* (1995:6) dalam Ulum, 2001).

Dalam peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Disamping undang-undang tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada intinya, semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.1.3 Transparansi (*transparency*)

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*). Transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan ini memiliki ciri dengan indikator :

a) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; b) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu; c) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; dan d) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan (Dadang, 2006 dalam Insani, 2009).

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik, dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah lebih partisipatif dan *pro poor*, mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktik KKN (Zetra, 2009). Disamping itu, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan maka diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan akan terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

2.1.4 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.5 Nilai Informasi

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :

1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

e) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

f) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

g) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

h) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.6 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010). Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa

pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

2.1.7 Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010).

2.1.8 Keandalan (*Reliability*) dan Ketepatanwaktuan (*Timeliness*) Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Ketepatanwaktuan merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai. Akibatnya, akan berdampak dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.9 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan

keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pengendalian intern akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2) Pengendalian administratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Personel yang kompeten
- b. Pelimpahan tanggung jawab
- c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait
- d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional

Menurut Wilkinson *et al.* , (2000) dalam Indriasari (2008), sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah

(a) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor, (b) pemisahan tugas, (c) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, (d) pemeriksaan independen atas kinerja, dan (e) penilaian yang tepat atas jumlah yang dicatat.

2.1.10 Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut.

- a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- b. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- c. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah

dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

- d. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Azhar (2007) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh”, dengan variabel independen antara lain komitmen, sumber daya manusia, perangkat pendukung, serta regulasi, sedangkan variabel dependen adalah keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara simultan komitmen, sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sementara secara parsial, regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Tuasikal (2007) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)”. Variabel independen yang digunakan adalah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel dependen adalah kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan adanya peningkatan pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah, maka kinerja satuan kerja pemerintah daerah akan meningkat.

Indriasari (2008) meneliti tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)”. Variabel independen yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi

informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Warisno (2009) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi”. Variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi, dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Secara parsial, hanya kualitas sumber daya manusia dan komunikasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD, sedangkan sarana pendukung dan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD.

Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)”. Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010). Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar

Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H2 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

- H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
- H4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

- H5 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.3.4 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang

dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah

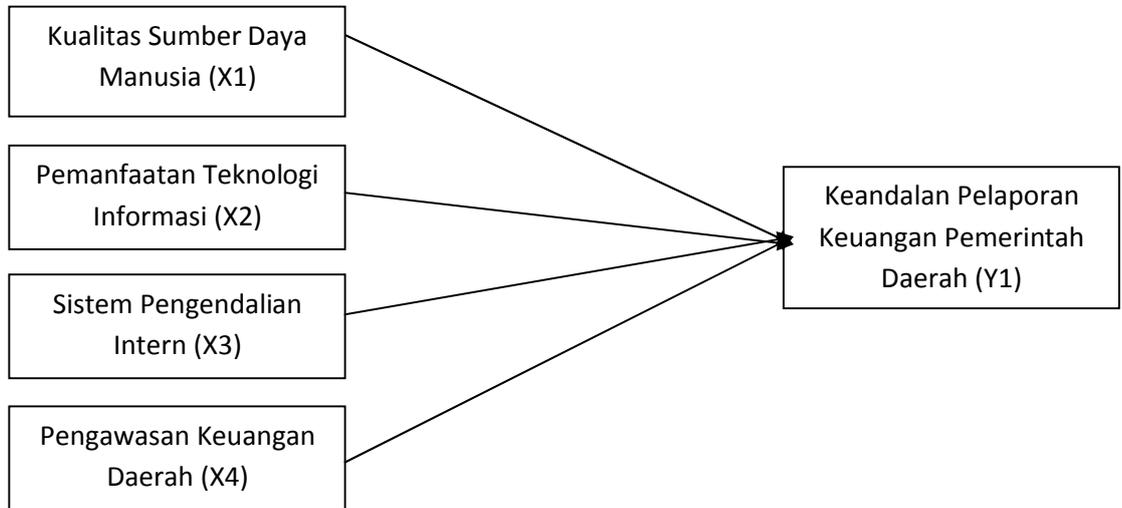
daerah, dan terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H6 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

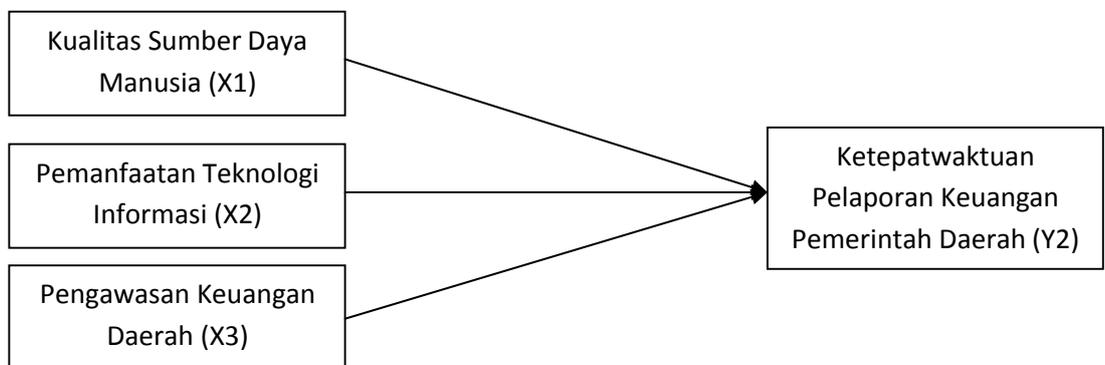
H7 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, diidentifikasi variabel independen (X) yang diperkirakan baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan pada kerangka pemikiran berikut.

Model 1**Gambar 2.1**

Model Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Model 2**Gambar 2.2**

Model Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1 Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keandalan yang merupakan variabel dependen adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Sedangkan ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, yang diadaptasi dari Indriasari (2008) yang telah dikembangkan, yang masing-masing variabel diukur

dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, mempunyai skor 1, (2) Tidak Setuju, mempunyai skor 2, (3) Netral, mempunyai skor 3, (4) Setuju, mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju, mempunyai skor 5. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.1.2.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.1.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010). Pengukuran

variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.1.2.4 Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.1.2.5 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin.

Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Adapun penjelasan mengenai dimensi variabel, indikator variabel, dan skala pengukuran dijelaskan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Kualitas sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pendidikan 2. Uraian peran dan fungsi 3. Peran dan tanggung jawab 4. Fungsi akuntansi 5. Sumber daya pendukung operasional 6. Pelatihan keahlian dalam tugas 7. SDM yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub bagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan minimal D3 akuntansi. 2. Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas. 3. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah. 4. Uraian tugas sub bagian keuangan/akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi. 5. Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup. 6. Pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan. 7. SKPD memiliki sumber daya manusia yang mampu menyusun LKPD sesuai Standar Akuntansi. 	Skala Interval
2.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Software</i> aplikasi 2. Proses akuntansi secara komputerisasi 3. <i>Software</i> sesuai peraturan perundangan 4. Laporan akuntansi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian keuangan/akuntansi memiliki <i>software</i> aplikasi untuk melaksanakan tugas, seperti : <i>Microsoft Excel</i>, <i>MYOB</i>, dan sebagainya. 	Skala interval

		<p>manajerial yang terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemeliharaan peralatan 6. Perbaikan peralatan yang rusak/usang 7. Terdapat antivirus 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. 3. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi. 5. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. 6. Peralatan yang usang/rusak didata dan segera diperbaiki tepat pada waktunya. 7. Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) yang diperbarui secara teratur. 	
3.	Sistem Pengendalian Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) 2. Pemisahan wewenang 3. Dokumen dan catatan yang memadai 4. Tindakan disiplin atas pelanggaran 5. Pembatasan akses 6. Langkah-langkah pencegahan kerusakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). 2. Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. 3. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. 4. Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku. 5. Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses. 6. Terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer. 	Skala interval

4.	Pengawasan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Evaluasi kegiatan 3. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti 4. Pencatatan transaksi yang tepat waktu 5. Dokumentasi bukti transaksi 6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas 7. Laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 2. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dilakukan (triwulan, semester, tahunan). 3. Setiap kegiatan/transaksi keuangan telah dicatat dan setiap pencatatan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. 4. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar. 5. Bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pencatatan telah diarsipkan/didokumentasikan dengan baik. 6. Terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas. 7. Laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta disusun secara tepat waktu. 	Skala interval
5.	Keandalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi keuangan yang jujur dan wajar 2. Neraca 3. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Informasi dapat diuji 7. Rekonsiliasi secara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi keuangan disajikan secara jujur dan wajar dalam laporan keuangan. 2. Neraca disajikan. 3. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan. 4. Laporan arus kas disajikan. 5. Catatan atas laporan keuangan disajikan. 	Skala interval

		<p>periodik</p> <p>8. Informasi untuk kebutuhan umum</p>	<p>6. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.</p> <p>7. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.</p> <p>8. Informasi keuangan diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.</p>	
6.	Ketepatanwaktuan	<p>1. Tersedianya informasi</p> <p>2. Laporan yang sistematis</p> <p>3. Penyampaian laporan yang teratur dan sistematis</p>	<p>1. Informasi segera tersedia ketika dibutuhkan.</p> <p>2. Laporan-laporan seperti : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan sering disediakan secara sistematis dan teratur.</p> <p>1. Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur :</p> <p>a. Laporan realisasi semester pertama</p> <p>b. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD</p> <p>c. Neraca</p> <p>d. Laporan arus kas</p> <p>3. Catatan atas laporan keuangan</p>	Skala interval

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang mempunyai selisih sama antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Data yang diperoleh dari skala Likert adalah berupa data interval, karena skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju, skor 2 untuk

pernyataan tidak setuju, skor 3 untuk pernyataan netral, skor 4 untuk pernyataan setuju, dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang dengan jumlah 67 SKPD. Pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003 dalam Indriasari, 2008). Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, yang meliputi kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 150 kuesioner, yang didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer yang diperoleh adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang akan diberikan kepada responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis.

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Cara mengukur valid tidaknya adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2005:39). Pertanyaan yang tidak valid harus dikeluarkan dari model kemudian dihitung lagi perhitungan korelasinya. Cara menguji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menilai *convergent validity* dan *discriminant validity* berdasarkan output PLS.

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:41). Pengukuran

reliabilitas dapat dilakukan dengan *one short* atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukuran korelasi antar jawaban pertanyaan. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil output PLS, konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang baik jika nilai reliabilitasnya di atas 0,70 (Ghozali, 2008).

3.5.2 PLS (*Partial Least Square*)

Seperti dinyatakan oleh Wold (1985) dalam Ghozali (2008), *Partial least square* merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan banyak asumsi, ukuran sampel yang digunakan tidak harus besar, dan data tidak harus berdistribusi *normal multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Oleh karena lebih menitikberatkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka mispesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter. Dibandingkan dengan *Covariance Based SEM*, *component based SEM* – PLS menghindari dua masalah serius, yaitu *inadmissible solution* dan *factor indeterminacy* (Fornell dan Bookstein, 1982 dalam Ghozali, 2008). Kelebihan PLS adalah dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam *Covariance Based SEM* karena akan terjadi *unidentified model*.

Secara filosofis, perbedaan antara *covariance based SEM* dengan *component based PLS* terletak pada tujuan penggunaan model persamaan

struktural, untuk menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan prediksi (Anderson dan Gebing, 1988 dalam Ghozali, 2008). Pada situasi dimana peneliti mempunyai dasar teori yang kuat dan pengujian teori atau pengembangan teori sebagai tujuan utama riset, maka metode dengan *covariance based* SEM lebih sesuai. Namun untuk tujuan prediksi, pendekatan PLS lebih cocok.

Tahapan analisis dalam penelitian yang menggunakan ini meliputi pengujian *outer model/ measurement model* untuk menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya. Dalam tahap ini dilakukan beberapa pengukuran yang meliputi *convergent validity* dan *discriminant validity*. Tahapan selanjutnya adalah menilai *inner model*, yang dilakukan dengan uji *R-square* untuk model konstruk.

3.5.2.1 Model Pengukuran atau *Outer Model*

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score / component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. *Discriminant validity* dilakukan dengan membandingkan nilai *square root of average extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik (Ghozali, 2008:25).

3.5.2.2 Model Struktural atau *Inner Model*

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan PLS, dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.